

VOL. 3 | No. 02 | Juli 2011

ISSN: 2085-4641

# Literasi

JURNAL REFORMASI PENDIDIKAN

## Tanggungjawab Dunia Pendidikan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan



DEWAN PENDIDIKAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

# Literasi

JURNAL REFORMASI PENDIDIKAN

## Pemimpin Umum

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, MS

## Penanggungjawab

Ketua Dewan Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur

## Dewan Redaksi

Prof. Dr. Sam Abede Pareno,  
Prof. Daniel M. Rosyid, Ph.D,  
Prof. Dr. Roesminingsih, IPd,  
Sucipto, SH, M.Si, dan  
Budi Iswanto, MA, Ph.D

## Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. Gempur Santoso

## Wakil Pemimpin Redaksi

Ic. Daniel Rohi, M.Eng.Sc

## Redaksi Pelaksana

Drs. Bagong Suyanto, M.Si,  
Drs. Maksum, M.Si,  
Drs. B. Soeprapto, M.Si,  
Drs. F.J. Siswanto, Sulistyanto  
Soejoso, DR. H. Marheany Djumadi,  
SE, MM, Drs. Joko Adi Waluyo, ST,  
MM, DR. V. Luluk Prijambodo,  
M.Pd, Drs. Dwi Utomo, Nur Hidayat,  
S.Ag, M. Diah Agus Muslim, SH,  
Drs. Puryanto, M.Si., dan Nahtim  
M. Kasi, MM

## Produksi dan Pemasaran

Dra. Gadis Agung Prasmono

---

LITERASI, Jurnal Reformasi  
Pendidikan, diterbitkan oleh Dewan  
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tiga  
kali dalam setahun: Maret, Juli, dan  
November

---

### Alamat:

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya  
Telpun (031) 3811966  
Fax (031) 3813096  
E-mail: jurnal\_literasi@yahoo.com

## PENGANTAR REDAKSI

Upaya menciptakan dan membangun lingkungan yang lestari sesungguhnya membutuhkan dukungan yang serius dari dunia pendidikan. Tetapi, untuk memastikan sejauhmana mana dunia pendidikan mampu berkiprah, tentu dibutuhkan dukungan konsep yang jelas tentang pengendalian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya konsep yang bisa dijadikan dasar membangun *green-ecology* dan kesadaran etis ekologis. Dunia pendidikan disadari atau tidak memiliki tanggung jawab yang besar. Di tengah tantangan yang tidak ringan itu orang mempertanyakan apakah yang bisa diberikan oleh dunia pendidikan dalam pembentukan perilaku etis-ekologis. Apakah yang bisa disumbangkan pendidikan untuk turut serta membangun lingkungan hidup yang ramah, bukan lingkungan hidup yang "mudah marah".

Dalam Edisi Kedua, Volume III, Juli Tahun 2011 ini, LITERASI menampilkan topik utama tentang tanggungjawab dunia pendidikan terhadap upaya pelestarian lingkungan. Isu ini, sengaja dipilih sebagai topik utama, karena di tahun-tahun mendatang kita sadari bahwa ancaman terjadi anomali cuaca, dan *global warming* tampaknya makin mendekati kenyataan dan membutuhkan antisipasi yang sifatnya segera, tak terkecuali dari insan-insan dan dunia pendidikan.

Dalam LITERASI edisi terbaru ini, topik lain yang dicoba ditampilkan adalah tentang gagasan dari sejumlah ahli tentang pendidikan karakter, kesenjangan kualitas antar sekolah, perilaku users dan peran perpustakaan, serta kajian tentang perlindungan anak, dan *full day schools*.

Harapan kami semoga, LITERASI Edisi kedua Tahun 2011 ini dapat menggugah perhatian pembaca, khususnya kalangan pendidikan agar lebih peka dan dapat memperoleh ilham untuk mengembangkan lebih lanjut peran insan-insan pendidikan dalam mendorong tumbuhnya kepedulian dan kecerdasan masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian alam. Selamat membaca dan berkarya.

Redaksi

---

*LITERASI diterbitkan sebagai media informasi, diskusi dan sosialisasi masalah pendidikan, khususnya di Propinsi Jawa Timur. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, dan berbagai gagasan yang kritis. Redaksi mengundang para ahli, peminat, praktisi dan cendekiawan yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif persoalan pendidikan di Jawa Timur. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.*

# DAFTAR ISI

## TOPIK UTAMA

- (1) PENDIDIKAN ETIKA LINGKUNGAN BERBASIS ECOTHEOLOGY  
Prof. Dr. Zainuddin Maliki 1
- (2) PENDIDIKAN IPS BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM  
MEMPERSIAPKAN SISWA DI ERA GLOBAL  
Rindawati 13

## GAGASAN

- (1) MENYIKAPI PERILAKU USERS PADA LAYANAN PERPUSTAKAAN  
DI ERA DIGITAL  
Rahma Sugihartati 27
- (2) PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA PERSPEKTIF BUDAYA  
Sam Abede Pareno 32
- (3) KAMI PERCAYA KEPADA IBU/BAPAK GURU,  
BAHKAN SETELAH (MEREKA) MATI!  
Budi Iswanto 35
- (4) KETIMPANGAN KUALITAS ANTAR SEKOLAH: AKIBAT  
DARI KETIDAKMAMPUAN TENAGA PENDIDIKAN  
DALAM MENGHASILKAN OUTPUT PENDIDIKAN  
ATAUKAH KARENA REPRODUKSI KESENJANGAN SOSIAL?  
Tuti Budirahayu 39
- (5) MENGGAGAS SPM BIDANG PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
Septi Ariadi 55

## KAJIAN

- (1) MODEL INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL  
UNTUK MENGELIMINASI PRAKTIK KEKERASAN  
DI SEKOLAH DASAR  
Totok Suyanto, Pudji Astuti, Rr Nanik Setyowati dan Indri Fogar S 68

---

## DAFTAR ISI

---

- (2) PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BLITAR  
Bagong Suyanto 99
- (3) SEKOLAH DAN KESENJANGAN SOSIAL:  
ANALISIS SOSIAL ATAS MUNCULNYA SEKOLAH-SEKOLAH  
FAVORIT BERBENTUK FULDAY SCHOOL DI SURABAYA  
Udji Asiyah 122

# MENGGAGAS SPM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Septi Ariadi

Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Sosial UGM

## 1. Latar Belakang

Upaya peningkatan mutu pendidikan sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, sehingga mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera mengambil inisiatif untuk merumuskan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Pendidikan, termasuk di dalamnya arah dan strategi pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas, terencana dan benar-benar memperhatikan serta memperjuangkan kepentingan terbaik peserta didik.

Di era reformasi dan otonomi seperti sekarang ini disadari bahwa pengelolaan pendidikan tidak mungkin hanya dibebankan kepada pusat. Sebaliknya kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan akan sangat ditentukan oleh adanya desentralisasi pendidikan. Dari hasil kajian Tim Pokja (Kelompok Kerja) *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* yang dilakukan Bank Dunia dan Bappenas (2001) jauh-jauh hari telah ditegaskan bahwa, tujuan utama reformasi pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana membangun sistem pendidikan yang lebih baik, lebih mantap, dan lebih maju dengan seoptimal mungkin memberdayakan potensi daerah dan

partisipasi masyarakat lokal. Artinya, maju-mundurnya pembangunan bidang pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab dan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, tetapi justru menjadi tanggungjawab pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* yang terkait.

Pengalaman di masa lalu, telah membuktikan bahwa model paradigma lama pendidikan yang sentralistik, ternyata hanya melahirkan berbagai bias dan bahkan kontraproduktif bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, karena kekhasan dan variasi di tingkat lokal acapkali kurang terabaikan, dan bahkan dihilangkan atas nama kepentingan pusat. Di era otonomi daerah seperti saat ini, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sumenep harus benar-benar bertekad untuk merubah paradigma lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, dan kemudian mencoba mencanangkan paradigma serta perubahan baru yang lebih sesuai dengan tujuan reformasi, sekaligus kepentingan masyarakat lokal—khususnya kepentingan terbaik dari seluruh peserta didik dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sidi (2000), misalnya mengemukakan empat isu kebijakan peyelenggaraan

pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut berkaitan dengan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan. Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal dan unggulan.

Kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (*School Based Management*), dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.

Keempat, pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Di Kabupaten Sumenep, secara normatif, komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bisa kita lihat dari salah satu program prioritas dalam RPJM Kabupaten Sumenep yang dengan tegas menyatakan tekad Pemerintah Daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Artinya, selain berusaha menjamin kelangsungan dan tersedianya pemerataan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, termasuk di wilayah kepulauan (minimal sampai jenjang pendidikan dasar), Pemerintah Kabupaten Sumenep juga bertekad untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

Secara filosofis, kita menyadari bahwa pendidikan, sebagai proses pemanusiaan niscaya tidak bisa hanya direduksi sebagai kegiatan belajar-mengajar yang hanya berlangsung di sekolah. Keberlangsungan pendidikan, juga mustahil dapat berkembang dengan baik jika sekolah hanya mencoba hidup terpisah, berjarak, soliter, eksklusif, dan tidak mau menyapa lingkungan di sekitarnya. Di daerah seperti Kabupaten Sumenep, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa tidak harus saling menyapa dan mengembangkan pola

hubungan yang simbiosis mutualisme dengan lingkungan di sekitarnya, sebab ke arah mana Kabupaten Sumenep akan berkembang dan dikembangkan, sedikit-banyak ditentukan oleh perkembangan pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep yang berjarak dari kehidupan dan *setting* sosial daerahnya sendiri, bukan saja akan menimbulkan alienasi (keterasingan), tetapi juga menyebabkan terputusnya kesinambungan dan keselarasan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, dua hal penting yang perlu digarisbawahi adalah. Pertama, bagaimana mengarahkan pendidikan pada upaya untuk membangun kecakapan lintas-budaya peserta didik atau semacam semangat pluralisme yang membiasakan peserta didik untuk selalu bersikap terbuka, demokratis, dan toleransi pada perbedaan. Kedua, bagaimana pendidikan dikembangkan dengan semangat menjalin keselarasan (*link and match*) dengan pranata-pranata sosial-budaya dan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Untuk membangun suasana belajar di kelas yang kreatif dan menyenangkan (*joyfull learning*) mustahil dapat dilakukan jika institusi pendidikan bersikap kaku, *kuper*, atau hanya puas dengan dunia kepompongnya sendiri, tanpa mau menyapa kearifan lokal dan berbagai pranata sosial-budaya yang menjadi *setting* sosial masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Bagi Kabupaten Sumenep, penyelenggaraan pendidikan ke depan, oleh sebab itu harus dipahami sebagai bentuk proses pemupukan modal sosial,

atau bahkan bentuk investasi sosial. Berbeda dengan investasi di bidang ekonomi yang hasilnya seringkali bisa dinikmati dengan segera dalam hitungan satu-dua tahun berselang, yang namanya investasi sosial umumnya baru bisa dirasakan dalam jangka menengah, bahkan mungkin jangka panjang. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas bagi daerah seperti Sumenep, tentu mustahil bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek secara *instant* atau karbitan. Untuk membangun bidang pendidikan yang benar-benar berkualitas, selain membutuhkan waktu cukup lama dan komitmen yang terjaga staminanya secara terus-menerus, juga membutuhkan dukungan dari semua pihak—baik dalam rangka mempersiapkan infrastruktur yang layak maupun dalam rangka pengkayaan wawasan peserta didik.

Ke depan, untuk menjamin agar upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan benar-benar dapat direalisasi secara nyata, ke depan salah satu perangkat yang dibutuhkan sebagai acuan adalah adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal). Birokrasi di era otonomi daerah ini tidak bisa tidak harus mempunyai tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat umum (Sarundajang, 2003: 163). SPM merupakan standar pelayanan minimal publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin pelayanan minimal yang berhak diperoleh warga masyarakat dari pemerintah daerah. Dengan kata lain, SPM merupakan tolok ukur untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti: kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan dan lain-lain. Di samping SPM untuk kewenangan wajib, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar kinerja untuk kewenangan daerah yang lain (Sarundajang, 2003: 168).

Dengan SPM, akan terjamin kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan terhindar dari kesenjangan pelayanan antardaerah. Harus dibedakan antara pemahaman tentang SPM dan persyaratan teknis dari suatu pelayanan. Standar teknis merupakan faktor pendukung untuk mencapai SPM (Sarundajang, 2003: 170). Secara garis besar, arti penting SPM bagi daerah adalah: pertama, SPM dapat bermanfaat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik. Kedua, SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. Ketiga, adanya SPM akan memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan akan merangsang terjadinya *check and balance* yang efektif antara lembaga-lembaga eksekutif dan lembaga DPRD. Keempat, adanya SPM akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut

(Suwandi dalam Sarundajang, 2003: 171-172).

Kegiatan sebagaimana dilaporkan akan membatasi diri pada penyusunan SPM bidang pendidikan saja. Sengaja dipilih SPM bidang pendidikan, sebab selain merupakan salah satu pelayanan dasar yang penting bagi masyarakat, penyusunan SPM bidang pendidikan ini mendesak dilakukan karena di Kabupaten Sumenep perbaikan dan optimalisasi pelayanan pendidikan merupakan program prioritas yang dipilih untuk dikembangkan di era otonomi daerah.

## 2. Metode dan Prosedur Kegiatan

Kegiatan ini pada dasarnya bermaksud merumuskan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Seluruh data yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui beberapa cara. *Pertama*, mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai kondisi pelayanan publik di Kabupaten Sumenep, khususnya pelayanan publik bidang pendidikan. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Uraian tentang kondisi demografi dan pelayanan publik ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sumenep, khususnya di era otonomi daerah.

*Kedua*, melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan Kepala Sekolah, guru, siswa, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, dinas terkait, *stakeholder*, dan para pakar untuk memetakan situasi problematik yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten



Sumenep dalam upaya melakukan proses perbaikan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Di samping itu, FGD juga dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi indikator kinerja, prasyarat dan target yang realitis dicapai dalam poses perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep.

*Ketiga*, mencari masukan dari masyarakat, khususnya peserta didik tentang proses pembelajaran yang diharapkan, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Di akhir laporan, selain dirumuskan kembali situasi problematik dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, juga dikemukakan sejumlah prasyarat yang dibutuhkan untuk mendukung serta mempercepat upaya perbaikan pelayanan pendidikan yang lebih berpihak kepada siswa sebagai subyek pembelajaran.

### 3. Isu Prioritas

Secara garis besar, persoalan mendasar dalam pembangunan bidang pendidikan yang dihadapi Kabupaten Sumenep dewasa ini paling-tidak menyangkut tiga hal pokok, yaitu: (1) persoalan mutu pendidikan, (2) pemerataan pendidikan dan (3) manajemen pendidikan. Yang berkaitan dengan persoalan mutu pendidikan adalah persoalan kompetensi guru, evaluasi hasil belajar, disparitas sekolah favorit dan pinggiran, termasuk pula antara wilayah daratan dan kepulauan, dan kelengkapan sarana serta prasarana belajar. Sedangkan yang berkaitan dengan persoalan pemerataan pendidikan

adalah masalah kelangsungan pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin, serta *performance* Sekolah kejuruan. Sementara itu, yang dimaksud manajemen pendidikan adalah menyangkut segala macam pembenahan birokrasi sekolah, implementasi Program MBS, transparansi dana pendidikan, dan lain-lain.

Selama ini, sebetulnya sudah banyak upaya dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain menggulirkan kebijakan desentralisasi pendidikan dan otonomi sekolah, dan mencanangkan pendekatan MBS, program *life skills*, dan sebagainya, mulai tahun ajaran 2007/2008 Depdiknas menurut rencana akan memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi sekolah-sekolah yang mampu melaksanakannya, dan pada tahun ajaran 2009/2010 seluruh sekolah sudah akan diwajibkan melaksanakan KTSP secara penuh. Dengan KTSP, diharapkan siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah dapat memperoleh kompetensi yang diinginkan, dalam arti mereka benar-benar menguasai bahan yang diajarkan, dapat memanfaatkan pengertiannya untuk hidup, dapat mengembangkannya agar lebih maju, dan juga dapat menggunakannya dalam kehidupan bersama di masyarakat. Dalam istilah UNESCO, fungsi belajar yang hakiki adalah untuk *to know, to do, to be, dan to live together*.

Dengan diterapkannya berbagai inovasi di atas, diharapkan proses pembelajaran akan dapat berlangsung lebih baik dan berkualitas. Tetapi, persoalannya sekarang:

akibat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan, harus diakui bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di berbagai sekolah acapkali berjalan tidak seperti yang diharapkan karena berbagai faktor. Guru yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program, seringkali tidak siap ketika dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Masih banyak guru yang mengajar dengan cara-cara lama dan kurang melibatkan dan mendorong tumbuhnya peran aktif siswa untuk mampu belajar mandiri. Tidak banyak guru yang mampu dan siap secara psikologis untuk mengajar dengan suasana yang penuh kegembiraan (*joy full learning*), dan bersedia mengembangkan ruang dialog dengan siswa tanpa terbebani dengan model hubungan yang sifatnya asimetris.

Di banyak sekolah proses pembelajaran acapkali juga terganggu karena situasi sekolah yang tidak memungkinkan pembelajaran berjalan lancar. Kendati sebagian besar gedung dan ruang kelas yang ada tergolong representatif, tetapi tidak sedikit sekolah dilaporkan kondisinya kurang layak, seperti gedung sekolah yang rusak, ruang kelas yang bocor, tidak adanya alat peraga mengajar, dan juga seringkali tidak didukung dengan perpustakaan dan laboratorium yang memadai.

Untuk sekolah-sekolah tertentu yang tergolong favorit, memang sarana dan prasarana yang tersedia biasanya cukup

melimpah: di sana ada ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, tempat olah raga siswa yang luas dan nyaman, perpustakaan yang lengkap, komputer untuk praktek siswa yang memadai, rasio guru:siswa yang sangat memadai, ditambah berbagai fasilitas lain yang membuat iklim belajar menjadi jauh lebih kondusif. Tetapi, sekolah semacam ini di Kabupaten Sumenep harus diakui jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Di Kabupaten Sumenep, harus diakui masih kental terlihat apa yang disebut disparitas antara sekolah favorit-pinggiran, terlebih di wilayah kepulauan. Di balik berbagai kelebihan yang dimiliki sekolah favorit, sebetulnya masih cukup banyak sekolah-sekolah pinggiran yang kondisinya memprihatinkan, baik dari segi sarana dan prasarana yang tersedia, kompetensi guru yang mengajar di sana maupun kualitas siswa yang ada.

Bagi anak-anak yang tergolong dan berasal dari keluarga miskin, janganakan berbicara untuk dapat diterima di sekolah yang favorit, bahkan untuk sekadar melangsungkan pendidikan hingga jenjang pendidikan dasar pun mereka acapkali kesulitan. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa siswa yang sejak awal belajar dengan sarana dan prasarana yang pas-pasan, bahkan kekurangan, mereka umumnya prestasi belajarnya kurang menggemblakan. Selain terbukti rawan *Drop-Out*, siswa seperti ini biasanya hasil UNAS mereka juga di bawah rata-rata, dan bahkan tidak sedikit yang tidak lulus.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dan analisis data sekunder, sejumlah isu prioritas bidang pendidikan yang perlu

mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu jangka menengah (2007-2011) adalah:

1. Kompetensi dan persebaran guru umumnya masih belum merata. Diprediksi hanya sekitar 25% guru yang layak mengajar, 25% semi layak mengajar, dan sekitar 50% guru masih terkategori tidak layak mengajar.
2. Masih terjadi disparitas antara sekolah favorit dan pinggiran, baik dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki, kualitas guru maupun kualitas siswa yang ada.
3. Di sebagian sekolah di Kabupaten Sumenep masih ditemui adanya gedung dan ruang kelas yang rusak dan terancam rusak.
4. Kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin acapkali terhambat, karena persoalan biaya pendidikan yang makin tak terjangkau dan fungsi anak sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga.
5. Implementasi MBS di berbagai sekolah umumnya belum berjalan dengan maksimal.
6. Ketersediaan laboratorium di berbagai sekolah umumnya masih belum merata, baik laboratorium IPA, laboratorium bahasa, maupun laboratorium untuk tempat praktikum/kerja.
7. Kelengkapan alat peraga mengajar di berbagai sekolah masih jauh dari memadai.
8. Peran Komite Sekolah umumnya belum berjalan dengan maksimal, karena sebagian besar Komite Sekolah umumnya dibentuk dengan cara *instant* dan posisi *bargaining* pengurusnya relatif lemah di hadapan sekolah.
9. Pengelolaan dan pemanfaatan dana pendidikan di berbagai sekolah umumnya masih belum benar-benar transparan.
10. Jumlah siswa mengulang kelas dan rawan *Drop-Out* (DO) masih cukup tinggi. Angka mengulang kelas untuk SD/MI sebanyak 5,72% dan putus sekolah sebanyak 7,97%, untuk SMP/MTs yang mengulang kelas sebanyak 0,24% dan putus sekolah sebanyak 0,3%, sedangkan untuk SMA/MA yang mengulang kelas sebanyak 0,2% dan putus sekolah sebanyak 0,33%.
11. Cukup banyak siswa di Kabupaten Sumenep yang hasil UNASnya kurang memuaskan, baik yang rata-rata nilainya pas-pasan atau bahkan yang tidak lulus UNAS.
12. Sekolah Kejuruan acapkali masih menghadapi kendala keterbatasan sarana dan prasarana untuk dapat menghasilkan lulusan yang benar-benar berkompeten dan mendongkrak animo masyarakat terhadap sekolah kejuruan.

#### **4. Agenda Pembangunan Pendidikan Kabupaten Sumenep**

Ke depan, sejumlah agenda reformasi pembangunan bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian khusus Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

1. Pengembangan kesadaran baru bahwa hakekat pendidikan adalah sebagai modal atau bentuk investasi sosial yang merupakan prasyarat mutlak bagi

peletakan basis sosial masyarakat Kabupaten Sumenep yang lebih berkualitas dan siap menyambut era globalisasi.

2. Pengembangan model pengelolaan pendidikan yang semula serba sentralistik dan otoriter ke arah baru yang lebih demokratis, otonom, dan menghargai keberagaman atau pluralisme.
3. Pengembangan paradigma pembelajaran yang semula cenderung mengalienasikan peserta didik ke arah baru yang lebih terbuka, dan menempatkan peserta didik benar-benar sebagai subyek pendidikan atas dasar prinsip *best interest of the child*.
4. Menetapkan orientasi pendidikan yang semula lebih banyak mementingkan hasil akhir menuju pendidikan baru yang lebih berorientasi pada proses dan perkembangan peserta didik.
5. Pengembangan kurikulum yang semula serba sentralistik ke arah kurikulum baru yang benar-benar kontekstual dan mampu merangsang tumbuhnya kreativitas dan kecerdasan peserta didik.
6. Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru yang semula hanya diukur atas dasar perolehan ijazah ke arah baru pemberdayaan guru yang

benar-benar kreatif, profesional dan mandiri.

7. Pengembangan suasana pembelajaran yang semula asimetris dan memperlakukan siswa sebagai bejana ke kosong ke arah baru yang lebih simetris, terbuka, dialogis dan *joyfull learning*.
8. Pengembangan dan revitalisasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang semula hanya pada aspek pendanaan saja ke arah baru yang lebih menyeluruh dan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

#### **5. Program Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep**

Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan desentralisasi dan otonomi pendidikan meski merupakan peluang dan kesempatan baru untuk memperbaiki mutu pendidikan, tetapi hal itu juga sekaligus merupakan tantangan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2007-2011), untuk lebih menjamin agar orientasi baru yang dikembangkan benar-benar berjalan pada rel yang dicita-citakan, beberapa isu prioritas, program dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

## GAGASAN (5)

Tabel 1

Isu Prioritas dan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep

Isu Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator
Kompetensi dan persebaran guru umumnya masih belum merata.	Standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan/kursus bagi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan kuliah</li> <li>- Pemberdayaan peran MGMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio antara guru dan siswa tercapai titik keseimbangan/ standar yakni 1:36</li> <li>- Jumlah guru yang layak mengajar mengalami peningkatan</li> <li>- Terjadi peningkatan persebaran jumlah guru secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep</li> <li>- Jumlah guru yang berkompeten dengan tingkat pendidikan sesuai kebutuhan mengalami peningkatan</li> </ul>
Disparitas antara sekolah favorit dan pinggiran	Penyeragaman mutu dan fasilitas belajar di berbagai sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan fasilitas belajar bagi sekolah pinggiran</li> <li>- Penempatan Kepala Sekolah dan guru berprestasi untuk memberdayakan sekolah pinggiran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terealisasi disparitas antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran</li> <li>- Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah pinggiran mengalami peningkatan</li> <li>- Terjadi keseimbangan tentang rasio sekolah dan murid, kelas dan murid serta guru dan murid antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran</li> </ul>
Gedung dan Ruang Kelas yang Rusak dan Terancam Rusak	Rehabilitasi gedung dan ruang kelas yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi, pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang kelas yang rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pembangunan dan perbaikan gedung dan ruang kelas di seluruh wilayah</li> <li>- Jumlah gedung dan ruang kelas dengan kategori rusak dan rusak ringan mengalami penurunan</li> <li>- Siswa makin nyaman belajar di kelas</li> </ul>
Kelangsungan Pendidikan Anak-anak Dari Keluarga Miskin	Program peningkatan partisipasi anak-anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beasiswa bagi anak usia sekolah</li> <li>- Penyaluran BOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka partisipasi anak usia sekolah dari keluarga miskin berhasil menuntaskan pendidikan 9 tahun mengalami peningkatan</li> <li>- Jumlah beasiswa bagi anak dari keluarga miskin mengalami peningkatan</li> </ul>
Belum Optimalnya Implementasi Program MBS	Implementasi MBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan MBS bagi Kepala Sekolah dan guru</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi Program MBS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin meningkatnya jumlah sekolah yang mengimplementasikan program MBS</li> <li>- Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tentang MBS bagi kepala sekolah dan guru semakin intensif</li> <li>- Jumlah kepala sekolah dan guru yang memahami MBS mengalami peningkatan</li> </ul>
Belum Meratanya Ketersediaan Laboratorium	Penyediaan dan pembangunan laboratorium yang layak dan merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan laboratorium IPA dan Bahasa</li> <li>- Bantuan alat praktikum IPA, bahasa dan alat praktek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi peningkatan jumlah sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium yang lengkap dan memadai</li> <li>- Terjadi pemerataan ketersediaan laboratorium yang lengkap dan memadai di sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep</li> </ul>

## GAGASAN (5)

Belum Memadainya Kelengkapan Alat Peraga Mengajar	Program pengadaan alat peraga belajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan alat peraga belajar (bola dunia, duplikat tengkorak manusia dan hewan, peta)</li> <li>- bantuan bahan dana alat pratikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan alat peraga yang lengkap dan memadai untuk mendukung proses pembelajaran mengalami peningkatan</li> <li>- Terjadi pemerataan ketersediaan alat peraga yang lengkap dan memadai di sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.</li> </ul>
Belum Optimalnya Peran Komite Sekolah	Revitalisasi Peran Komite Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan bagi pengurus Komite Sekolah</li> <li>- Memberdayakan peran Komite Sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sekolah yang telah mengoptimalkan peran komite sekolah mengalami peningkatan</li> </ul>
Transparansi dan Pemanfaatan Dana Pendidikan di Sekolah	Transparansi penggunaan dana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan penggunaan dana pendidikan di berbagai sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin menurunnya kejadian mis manajemen atau salah kelola dana sekolah serta kasus penyalahgunaan dana sekolah</li> </ul>
Jumlah Siswa Mengulang Kelas dan Rawan <i>Drop-Out</i> (DO) Masih Cukup Tinggi	Program penanganan siswa rawan DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursus tambahan bagi siswa rawan DO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah siswa tidak naik kelas mengalami penurunan</li> <li>- Nilai rata-rata atau prestasi belajar siswa mengalami peningkatan</li> <li>- Angka transisi sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mengalami kenaikan.</li> </ul>
Cukup Banyak Siswa yang Hasil UNASnya Kurang Memuaskan	Program Siswa Siap UNAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan belajar intensif UNAS bagi siswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah siswa yang lulus UNAS mengalami peningkatan</li> <li>- Nilai rata-rata UNAS mengalami peningkatan</li> </ul>
Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah Kejuruan	Revitalisasi dan peningkatan mutu Sekolah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan bagi guru Sekolah Kejuruan</li> <li>- Bantuan fasilitas praktek bagi Sekolah Kejuruan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah sekolah kejuruan yang berkualitas dan fasilitas yang memadai mengalami peningkatan</li> <li>- Animo masyarakat pada sekolah kejuruan mengalami peningkatan</li> </ul>

### 6. Prasyarat

Upaya untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus upaya sistemik yang satu sama lain saling terkait, mulai dari *input raw*, *instrumental input*, *environmental input*, dan *out put* yang dihasilkan. Sejauhmana sebuah kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung menyenangkan bagi peserta didik dan benar-benar berkualitas, tentu membutuhkan pembenahan mulai dari tingkat hulu hingga hilir.

Selain terus meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, proses belajar-mengajar di berbagai sekolah di Kabupaten Sumenep akan dapat berlangsung dengan baik jika di saat yang sama juga dilakukan pembenahan dalam proses seleksi dan mempersiapkan kualitas siswa sejak dini (PAUD). Di samping itu, sejauhmana proses belajar-mengajar di sekolah dapat berlangsung sebagaimana diharapkan, tentu juga tergantung pada peran aktif Dewan Pendidikan dan kadar keberdayaan pengurus Komite Sekolah sebagai mitra

kerja Kepala Sekolah dan guru di lapangan.

Di muka telah dipaparkan dengan rinci situasi prolematik, isu prioritas bidang pendidikan yang perlu dibenahi di tahun-tahun mendatang. Agar prakarsa untuk melakukan reformasi pendidikan di Kabupaten Sumenep benar-benar dapat terlaksana, maka sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Apa pun kebijakan dan keputusan yang diambil dalam upaya melakukan reformasi pendidikan, yang terpenting semua harus dibangun atas dasar prinsip *best interest of the child*. Artinya, anak didik dalam situasi apa pun harus ditempatkan sebagai subyek, dan benar-benar diperhitungkan dampak dari setiap kebijakan yang digulirkan bagi kelangsungan pendidikan dan hak anak untuk tumbuh-kembang, serta melangsungkan pendidikannya hingga jenjang paling tinggi yang bisa mereka raih.
2. Perlu didukung keberanian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memenuhi amanat Amandemen UUD 1945 tentang alokasi dana pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN dan APBD. Tanpa ada dukungan dana yang memadai, niscaya ruang gerak dan energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki mutu pendidikan menjadi kurang leluasa, bahkan tidak mustahil hasilnya menjadi setengah-setengah.
3. Selain perlu didukung dengan kesejahteraan guru yang relatif terjamin atau layak, peningkatan mutu

pembelajaran di sekolah sesungguhnya juga sangat tergantung kepada kualitas SDM guru sebagai ujung tombak perbaikan proses belajar-mengajar di sekolah. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, persoalannya bukan hanya terletak pada kecukupan rasio antara guru:murid, tetapi yang terpenting adalah pada kualitas dan kemampuan guru itu sendiri dalam mengajar anak didik. Di era reformasi dan otonomi sekolah seperti sekarang ini, guru niscaya dituntut untuk selalu mampu bertindak kreatif, mengembangkan pikiran-pikiran dan ide-ide yang segar untuk merangsang sikap kritis anak didik, dan tidak semata-mata mengandalkan kepada pola-pola pengajaran yang asimetris. Di Kabupaten Sumenep, sekali pun jumlah guru mungkin sudah tergolong memadai, tetapi alangkah baiknya jika guru-guru yang ada diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya agar dalam kegiatan pengajaran di kelas dapat berlangsung dengan penuh kegembiraan (*joyfull learning*) dan kreatif.

4. Potensi warga masyarakat dan swasta untuk terlibat dalam pembiayaan dan mengembangkan kualitas pendidikan sebetulnya sangat besar. Hanya saja di mata masyarakat masih ada rasa ketidakpercayaan, bahkan syakwasangka tentang lembaga dan siapa pengelola lembaga yang bisa dipercaya untuk menampung sumbangan dan peran serta masyarakat. Ke depan, agar potensi masyarakat ini benar-benar bisa

tersalurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka ada baiknya jika Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep segera mengambil inisiatif dan bersikap proaktif untuk terus-menerus mensosialisasikan dan menggali dana masyarakat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep. Salah satu bentuk program penggalian dana masyarakat yang bisa dikembangkan Dewan Pendidikan di Kabupaten Sumenep ini, misalnya

adalah ZAKAT PENDIDIKAN, AMAL PENDIDIKAN, IURAN PENDIDIKAN, dan sebagainya—yang intinya bertujuan untuk mewadahi potensi masyarakat. Sudah barang tentu sebelum program ini diluncurkan harus ada jaminan bahwa Pemerintah Daerah dan lembaga Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep memang benar-benar kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dikelola secara transparan, dan di dalamnya benar-benar diisi oleh figur-figur yang berkompeten dan bersih (\*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Aulia Reza., 2002. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Budiono, 1997. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Budiono, 1998. *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Pendidikan*. Jakarta: Pusat penelitian Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian UI.
- Chan, Sam M & Tuti T. Sam. 2005. *Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Drost, J. 2005. *Dari KBK Sampai MBS, Essai-Essai Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Darmaningtyas, 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa krisis*. Yogyakarta: Kerjasama LPIST dan Pustaka Pelajar.
- Hariadi, Sri Sanituti & Bagong Suyanto (eds.), 2001. *Anak-anak yang Dilanggar Haknya: Potret Sosial Anak Rawan di Indonesia yang membutuhkan Perlindungan Khusus*. Kerjasama Pusat Kajian Anak FISIP Unair, LPA Jatim, dan UNICEF.
- Inkeles, Alex dan Larry J. Diamond, "Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective," dalam *The Quality of Life: Comparative Studies*, ed. Alexander Szalai dan Frank M. Andrews, London: Sage Publications, 1980.
- Jiyono & Runtini, 2000. *Menuju Manajemen Berbasis Sekolah di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: UNESCO-UNICEF-DPDIKBUD.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Bappenas, Depdiknas, dan Adicita.
- Kasim, Ifhdal dan Arus, Johannes da Masenus, 2001. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: ELSAM.



- Kuntoro dkk., 1996. *Beberapa Faktor yang mempengaruhi Putus Sekolah Siswa Wanita di Sekolah Dasar dan Lanjutan Tingkat Pertama di Beberapa Desa di Jawa Timur*. Kerjasama BKKBN, UNFPA, dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Kartono, St., 2002. *Menebus Pendidikan yang Tergadai: Catatan Reflektif Seorang Guru*. Yogyakarta: Galang Press.
- Muslim, Faesol dkk., 2000. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan*. Jakarta: UNESCO-UNICEF-Pemerintah RI.
- Robinson, Philip, 1986. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Ronisef, Sjafnir dkk (eds.). *Mengurai Benang Kusut Pendidikan: Gagasan Para Pakar Pendidikan*. Jogjakarta: Transformasi UNJ bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Suderadjat, Hari. 2004. *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Pembaharuan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003*. Bandung: Cipta Cekas Grafika.
- Sindhunata (ed.), 2000. *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sularto, St., 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: KOMPAS Bekerjasama dengan World Vision Indonesia.
- Soebakir, Soepriono & Achmad Sapari, 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Kerjasama Pemerintah RI, UNESCO dan UNICEF.
- Suparno, Paul dkk. , 2002. *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarief, Ikhwanuddin & Dodo Murtadlo (eds), 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar, M.Sc.Ed*. Jakarta: Grasindo.
- Widiastono, Tonny D. (ed.), 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Kompas dan Yayasan Toyota & Astra.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II: Kurikulum Untuk Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Challenges for a New Generation. The Situation of Children and Women in Indonesia 2000*. UNICEF dan Pemerintah RI.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.

Vol. 3  
No. 02  
Juli 2011

### TOPIK UTAMA

Pendidikan Etika Lingkungan Berbasis Ecotheology

Prof. Dr. Zainuddin Maliki

Pendidikan IPS Berwawasan Lingkungan  
dalam Mempersiapkan Siswa di Era Global

Rindawati

### GAGASAN

Menyikapi Perilaku *Users* pada Layanan Perpustakaan di Era Digital

Rahma Sugihartati

Pendidikan Karakter Bangsa Perspektif Budaya

Sam Abede Pareno

Kami Percaya Kepada Ibu/Bapak Guru, Bahkan Setelah (Mereka) Mati!

Budi Iswanto

Ketimpangan Kualitas Antar Sekolah: Akibat dari Ketidakmampuan  
Tenaga Pendidikan dalam Menghasilkan *Output* Pendidikan  
Ataukah Karena Reproduksi Kesenjangan Sosial?

Tuti Budirahayu

Menggagas SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep

Septi Ariadi

### KAJIAN

Model Instruksional Pendidikan Multikultural untuk Mengeliminasi  
Praktik Kekerasan di Sekolah Dasar

Totok Suyanto, Pudji Astuti, Rr Nanik Setyowati dan Indri Fogar S

Perlindungan Anak di Kabupaten Blitar

Bagong Suyanto

Sekolah dan Kesenjangan Sosial: Analisis Sosial atas Munculnya

Sekolah-sekolah Favorit Berbentuk *Fulday School* di Surabaya

Udji Asiyah

